

PENCEGAHAN BUNUH DIRI MELALUI KETAHANAN KELUARGA

Sulis Winurini*

21

Abstrak

Ketahanan keluarga menjadi isu krusial seiring munculnya kasus bunuh diri keluarga. Tulisan ini membahas urgensi penguatan ketahanan keluarga dan upaya yang perlu dilakukan. Pemerintah telah memiliki beragam program terkait ketahanan keluarga, namun program-program tersebut belum sepenuhnya efektif menyelesaikan permasalahan. Upaya penguatan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan dan dukungan lingkungan menjadi faktor penting. Pada level masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan membantu meningkatkan ketahanan keluarga. Pada level pemerintah, perbaikan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan diperlukan, begitu pun halnya dengan efektivitas pemanfaatan layanan. Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja kementerian/lembaga terkait dalam implementasi kebijakan/program tentang keluarga, serta memastikan supaya pemanfaatannya dapat efektif dan tepat sasaran. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat peran tokoh agama dalam perwujudan ketahanan keluarga. Koordinasi kementerian/lembaga terkait diperlukan supaya regulasi dan kebijakan bisa saling terhubung.

Pendahuluan

Pada 9 Maret 2024 satu keluarga melakukan bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 21 gedung apartemen di Penjaringan, Jakarta Utara, diduga karena dipicu masalah ekonomi (Purnajati, 2024). Kasus bunuh diri melibatkan satu keluarga adalah bentuk ekstrem rapuhnya ketahanan keluarga,

terutama pada keluarga rentan akibat keterbatasannya dalam menjalankan fungsi keluarga.

Ketahanan penting dimiliki keluarga. Keluarga yang memiliki ketahanan tidak hanya mampu bertahan dari krisis, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anggota keluarga untuk berubah dan berkembang



9 772088 235001

* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: sulis.winurini@dpr.go.id.

menjadi lebih baik (Walsh, 2002). Keluarga yang memiliki ketahanan akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara. Artinya, membentuk ketahanan keluarga menjadi syarat menjaga ketahanan di level nasional. Tulisan ini membahas urgensi penguatan ketahanan keluarga dan upaya yang perlu dilakukan.

Ketahanan Keluarga dan Program Pemerintah

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil guna hidup mandiri, mampu mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis. Dengan ketahanan, keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.

Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, yaitu melalui program yang disusun oleh kementerian/ lembaga terkait. Kementerian Sosial, misalnya, memfokuskan pada upaya mengatasi kerentanan fisik keluarga melalui pemberian bantuan sosial kepada keluarga penerima manfaat. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki Program Indonesia Pintar yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu untuk memperluas akses pendidikan anak-anak. Kementerian Kesehatan memiliki program Mobile Mental Health Service, yaitu layanan

kesehatan jiwa masyarakat dari mulai promosi hingga rehabilitatif (“Layanan Kesehatan Jiwa”, 2019). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki Program Pusat Pembelajaran Keluarga, yaitu tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga berbasis anak (Indonesia.KemenPPPA, 2021). Sementara BKKBN memiliki Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera untuk mengoptimalkan fungsi keluarga berkualitas melalui kegiatan pelayanan keluarga (Indonesia. BKKBN, 2023).

Urgensi Penguatan Ketahanan Keluarga

Capaian ketahanan keluarga Indonesia tergambar dalam Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dan Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Capaian iBangga sebesar 54,01 pada tahun 2021 dan 56,7 pada tahun 2022, sementara targetnya adalah 61 pada tahun 2024 (“Dengan iBangga, Pembangunan Keluarga”, 2023). Meskipun belum mencapai target, tetapi capaian pada tahun 2021 dan 2022 termasuk dalam kategori cukup baik. Sementara capaian IKK sebesar 73,84 pada tahun 2021 meningkat menjadi 77,38 pada tahun 2022, yang menunjukkan bahwa kualitas keluarga di Indonesia sudah berada pada kategori “responsif gender dan hak anak” (Indonesia. KemenPPPA, 2023).

Meskipun iBangga maupun IKK menunjukkan capaian yang relatif baik, namun patut disadari bahwa permasalahan keluarga di Indonesia ibarat fenomena gunung es, di mana data yang muncul belum sepenuhnya memperlihatkan permasalahan yang sebenarnya.

Hal ini tidak lepas dari budaya masyarakat Indonesia yang sungkan mengungkap permasalahan keluarga karena menganggapnya sebagai aib. Tidak heran, ada banyak kasus yang baru diketahui ketika permasalahannya sudah sangat berat hingga menggugah sisi kemanusiaan, yaitu hilangnya nyawa untuk mengakhiri penderitaan bersama. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sudah ada enam kasus bunuh diri dengan melibatkan anak dua tahun terakhir ini (Husada, 2024). Di luar kasus yang terjadi di tahun 2024, beberapa kasus lain yang pernah muncul di media tergambar dalam Tabel 1 ini.

Bunuh diri melibatkan satu

keluarga adalah bentuk ekstrem rapuhnya ketahanan keluarga. Ini menjadi ironi mengingat telah banyak program yang dibuat pemerintah untuk mendukung ketahanan keluarga. Tampak bahwa program-program yang ada belum sepenuhnya efektif menyelesaikan permasalahan, meskipun didukung angka capaian yang relatif baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penguatan ketahanan keluarga semakin dibutuhkan, terlebih Indonesia akan memasuki bonus demografi dan berupaya menjadi negara maju, melalui penduduk usia produktif yang unggul dan berdaya saing sebagaimana Visi Indonesia Emas tahun 2045.

Tabel 1. Kasus Bunuh Diri Keluarga

Tanggal	Kasus	Penyebab
12 Desember 2023	Sepasang suami istri dan satu anaknya tewas meminum racun di Malang, Jawa Timur	Motif ekonomi
7 September 2023	Kasus bunuh diri ibu dan anak di Depok, Jawa Barat. Mereka mati lemas karena mengurung diri di ruang sempit.	Frustasi dan depresi akibat masalah ekonomi setelah ditinggal kepala keluarga
10 November 2022	Jasad satu keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu, paman, dan anak ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Timur. Tidak ditemukan unsur tindak pidana atau upaya bunuh diri.	Masalah finansial, perilaku mengasingkan diri, sungkan minta pertolongan, dugaan ikut serta kepercayaan sesat, hingga sakit yang diderita korban
24 Oktober 2018	Seorang suami membunuh istri dan kedua anaknya dengan menembakkan senjata api jenis Revolver sebelum menembak dirinya sendiri.	Masalah pekerjaan dan masalah keluarga
3 April 2015	Satu keluarga ditemukan tewas bunuh diri di Kediri, Jawa Timur.	Masalah pekerjaan

Sumber: diolah dari berbagai media

Upaya Penguatan Ketahanan Keluarga

Upaya penguatan ketahanan keluarga perlu dilihat secara holistik. Keluarga sangat tergantung lingkungan di sekitarnya, begitu pun sebaliknya. Kaidah ekologi menetapkan adanya ketahanan suatu sistem yang dipengaruhi dukungan serasi dari seluruh subsistem (Soerjani, 2000). Hal ini menjelaskan bagaimana menurunnya kepedulian lingkungan sekitar telah memicu kerentanan keluarga. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meilala, mengatakan bahwa keluarga seharusnya dapat menjadi jaring pengaman. Masyarakat di masa lalu tidak segan meminta tolong kepada keluarga besar saat menghadapi kesulitan hidup. Namun, tren ini berkurang dengan semakin berjaraknya anggota-anggota keluarga sehingga bunuh diri keluarga dianggap sebagai pilihan terbaik (Rifki, 2024). Kerentanan semakin terasa jika dikaitkan dengan kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya lepas dari dampak pandemi Covid-19. Penguatan dukungan lingkungan, mulai dari lapisan terdekat keluarga hingga pemerintah menjadi faktor penting dalam ketahanan keluarga.

Pada level masyarakat, pemberdayaan masyarakat perlu dilihat sebagai upaya yang strategis. Melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, pendekatan religius atau komunitas bisa diaktifkan supaya keluarga rentan tidak melihat solusi ekstrem sebagai opsi menyelesaikan masalah, melainkan mampu memaknai situasi krisis secara positif, memiliki keyakinan dan harapan bahwa kesulitan bisa diatasi, memiliki nilai-nilai dan

tujuan hidup yang lebih jelas di masa depan. Upaya selanjutnya adalah meningkatkan kepedulian masyarakat melalui pembinaan dan pemberdayaan kader di tiap wilayah. Para kader bersama tenaga lapangan dari kementerian/ lembaga terkait dapat mendukung upaya identifikasi keluarga rentan, membantu menghubungkan keluarga rentan dengan sistem sumber dukungan, berperan dalam memperluas edukasi supaya keluarga memiliki kesadaran yang lebih baik bagi diri sendiri maupun sekitar, seperti memahami permasalahan yang dihadapi, serta yang terpenting adalah mengetahui apa yang harus dilakukan, bagaimana dampak keputusan yang diambil bagi keluarga, ke mana dan bagaimana mendapatkan bantuan atau layanan.

Pada level pemerintah, sebagaimana dijelaskan Puspitawati et al. (2023), strategi diperlukan untuk memperkuat mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan sebagai upaya bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam mewujudkan keluarga berketahanan. Strategi ini dilakukan melalui harmonisasi regulasi dan kebijakan, koordinasi kelembagaan pusat dan daerah, serta penerapan pendekatan keluarga dalam kebijakan, program, dan kegiatan. Dengan memperbaiki mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan, maka program yang dimiliki kementerian/ lembaga terkait bisa saling terhubung, dan lebih jelas dalam mencapai tujuan. Efektivitas pemanfaatan layanan program juga perlu dipikirkan, misalnya dengan merancang dan memperluas akses layanan yang

mudah diterima masyarakat, termasuk sosialisasi yang masif terkait program dan pemanfaatan layanan.

Penutup

Pemerintah telah memiliki beragam program terkait ketahanan keluarga, namun banyaknya kasus bunuh diri keluarga menunjukkan program-program tersebut belum sepenuhnya efektif menyelesaikan permasalahan. Upaya penguatan ketahanan keluarga menjadi kebutuhan dan dukungan lingkungan menjadi faktor penting. Pada level masyarakat, pemberdayaan masyarakat, melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pembinaan kader di tiap wilayah akan membantu meningkatkan ketahanan keluarga. Pada level pemerintah, perbaikan mekanisme sinergi dan koordinasi kebijakan diperlukan, begitu pun halnya dengan efektivitas pemanfaatan layanan dalam program.

DPR RI perlu mendorong Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk memperkuat koordinasi kementerian/lembaga terkait supaya regulasi dan kebijakan/program bisa saling terhubung. Komisi VIII, Komisi IX, Komisi X DPR RI perlu mengawasi kinerja kementerian/lembaga terkait dalam implementasi kebijakan/

program tentang keluarga, memastikan supaya pemanfaatannya dapat efektif dan tepat sasaran. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat peran tokoh agama dalam perwujudan ketahanan keluarga.

Referensi

- Indonesia. BKKBN. (2023). *Panduan praktis sistem rujukan pusat pelayanan keluarga sejahtera (Satyagatra)*.
- Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Indeks kualitas keluarga*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Pedoman standar pusat pembelajaran keluarga (Puspaga)*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Puspitawati, H., Sarma, Ma'mun., Septiyana, Maya., & Irzalinda, Vivi. (2023). Pentingnya kebijakan pembangunan keluarga menyongsong era Indonesia Emas Tahun 2045. *Policy brief*. IPB.